

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar material, tetapi juga meliputi aspek non-material dan sosial. Secara konseptual, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (Wulansari et al., 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2023), secara asal penyebab, kemiskinan terbagi menjadi 2 macam:

1. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan

2. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkat kemiskinan atau dengan perkataan lain ”seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.

Secara konseptual menurut standar penilaiannya, kemiskinan dibagi menjadi kemiskinan relatif dan absolut:

1. Ukuran kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif.
2. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non-makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Teori Lingkaran Kemiskinan (*Cycle of Poverty*) oleh Ragnar Nurkse (1953). Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan bersifat siklis, di mana individu atau kelompok yang terjebak dalam kemiskinan sulit keluar karena kurangnya modal, pendidikan, dan akses ke peluang ekonomi. Negara dengan pendapatan rendah

mengalami keterbatasan dalam investasi dan produktivitas, sehingga sulit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wulansari et al., 2023).

Teori Kapital Manusia (*Human Capital Theory*) oleh Gary Becker (1964) menyatakan bahwa kemiskinan terjadi akibat rendahnya investasi dalam pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah. Jika investasi dalam modal manusia meningkat, individu memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan.

Teori Dependensi (*Dependency Theory*) oleh Andre Gunder Frank (1967) menjelaskan bahwa kemiskinan di negara berkembang terjadi akibat ketergantungan terhadap negara maju, baik dalam hal ekonomi, perdagangan, maupun investasi. Sistem global yang timpang menyebabkan negara berkembang sulit untuk berkembang mandiri, sehingga ketimpangan ekonomi terus berlanjut (Elia & Marselina, 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada beberapa ukuran teknis kemiskinan yang umum digunakan:

1. *Head Count Index* (HCI/P0), persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*/P1), ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*/P2), menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Rumus head count index:

$$HCI = \frac{q}{N} \times 100$$

Dimana:

q = jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan

N = Jumlah total penduduk

BPS menggunakan definisi operasional kemiskinan sebagai penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan, di mana garis kemiskinan adalah penjumlahan nilai kebutuhan minimal makanan dan non-makanan. Indikator yang digunakan adalah *Head Count Index* (HCI/P0) untuk menghitung persentase penduduk miskin.

2.1.2 Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan populasi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya seperti pangan, air, perumahan, dan lapangan pekerjaan, sementara laju pertumbuhan yang rendah atau negatif dapat menyebabkan tantangan dalam struktur demografi, seperti populasi yang menua dan berkurangnya angkatan kerja produktif (Fauzi et al., 2022).

Untuk menghitung seberapa besar peningkatan jumlah penduduk dalam suatu periode waktu tertentu, digunakan rumus laju pertumbuhan penduduk. Rumus ini memberikan gambaran dalam bentuk persentase mengenai seberapa cepat

populasi suatu wilayah bertambah. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Penduduk (\%)} = \left(\frac{P_t - P_0}{P_0} \right) \times 100$$

Keterangan:

P_t = jumlah penduduk pada tahun ke-t (tahun akhir)

P_0 = jumlah penduduk pada tahun awal

Hasil dikali 100 untuk mengubah ke bentuk persentase

Menurut Suartha, 2016) faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk:

1. Kelahiran (Natalitas)

Tingkat kelahiran mencerminkan jumlah bayi yang lahir dalam suatu populasi per tahun. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kelahiran meliputi:

- a. Tingkat kesuburan (fertilitas): Jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya.
- b. Usia perkawinan: Semakin muda usia perkawinan, semakin panjang masa reproduksi wanita dan potensi jumlah anak yang dilahirkan.
- c. Ketersediaan layanan kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dapat memengaruhi tingkat kelahiran.

- d. Faktor sosial budaya: Norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat terkait jumlah anak yang ideal.

2. Kematian (Mortalitas)

Tingkat kematian mencerminkan jumlah kematian dalam suatu populasi per tahun. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kematian meliputi:

- a. Ketersediaan layanan kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dapat menurunkan tingkat kematian, terutama pada bayi dan anak-anak.
- b. Kondisi sanitasi dan kebersihan: Lingkungan yang bersih dan sanitasi yang baik dapat mencegah penyebaran penyakit dan menurunkan tingkat kematian.
- c. Gaya hidup: Pola makan, kebiasaan merokok, dan aktivitas fisik dapat memengaruhi risiko penyakit dan tingkat kematian.
- d. Faktor sosial ekonomi: Tingkat kemiskinan dan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat memengaruhi kesehatan dan tingkat kematian.

3. Migrasi (Mobilitas)

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain.

Migrasi dapat memengaruhi pertumbuhan penduduk suatu wilayah melalui:

- a. Imigrasi: Masuknya penduduk dari wilayah lain ke suatu wilayah, yang dapat meningkatkan jumlah penduduk di wilayah tujuan.

- b. Emigrasi: Keluarnya penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain, yang dapat mengurangi jumlah penduduk di wilayah asal.
- c. Faktor pendorong dan penarik: Kondisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan di wilayah asal dan tujuan dapat mendorong atau menarik penduduk untuk melakukan migrasi.

Beberapa teori telah dikemukakan untuk menjelaskan dinamika pertumbuhan penduduk. Salah satunya adalah Teori Malthusian yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus pada akhir abad ke-18. Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk cenderung meningkat secara geometris (berlipat ganda), sedangkan pertumbuhan produksi pangan hanya meningkat secara aritmetis (bertahap). Akibatnya, jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, akan terjadi kelangkaan sumber daya yang dapat menyebabkan kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, Teori transisi demografi menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial, suatu negara akan mengalami transisi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi ke tingkat yang lebih rendah, yang pada akhirnya menstabilkan pertumbuhan penduduk (Hambarsari & Inggit, 2016).

2.1.3 Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ekonomi yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini mencerminkan seberapa besar proporsi populasi yang

terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif (Muttaqin & Anwar, 2023). Tingkat partisipasi angkatan kerja dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin besar proporsi populasi yang berkontribusi terhadap perekonomian. Faktor-faktor seperti kebijakan ketenagakerjaan, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan faktor sosial budaya dapat mempengaruhi TPAK suatu negara atau wilayah.

Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kasar

Mengukur jumlah total angkatan kerja dibandingkan dengan total populasi usia kerja tanpa mempertimbangkan karakteristik spesifik seperti usia dan gender.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Spesifik

Menghitung partisipasi angkatan kerja berdasarkan kelompok usia, gender, atau wilayah tertentu untuk memahami pola partisipasi yang lebih rinci.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Membandingkan partisipasi tenaga kerja laki-laki dan perempuan guna melihat kesenjangan gender dalam pasar tenaga kerja.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan

Mengukur bagaimana tingkat pendidikan mempengaruhi keterlibatan dalam dunia kerja, di mana umumnya individu dengan pendidikan lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk bekerja di sektor formal.

Teori *Labor Theory of Value* Adam Smith, sebagai tokoh ekonomi klasik, menyatakan bahwa pertumbuhan kekayaan suatu negara bergantung pada keterampilan tenaga kerja yang digunakan. Ia berpendapat bahwa sumber utama pendapatan berasal dari hasil produksi tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Tingginya nilai suatu barang ditentukan oleh keunggulan mutlak yang dimilikinya. Keunggulan mutlak, menurut Smith, mengacu pada kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dengan memanfaatkan teknologi serta efisiensi tenaga kerja. Dalam teorinya yang dikenal sebagai *Labor Theory of Value*, ia menjelaskan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang terlibat dalam produksi, semakin tinggi pula nilai barang yang dihasilkan. Kemakmuran suatu negara diukur berdasarkan jumlah barang yang diproduksi, di mana proses produksi tersebut memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar (Anggoro & Soesatyo, 2015).

2.1.4 Indeks Globalisasi

Indeks Globalisasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara terintegrasi dalam proses globalisasi. Indeks ini mencerminkan keterlibatan negara dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik di tingkat global. Salah satu indeks yang dikenal luas adalah *KOF Globalisation Index*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Axel Dreher pada tahun 2002 (Gygli et al., 2019).

Menurut (Gygli et al., 2019) indeks ini mengevaluasi tingkat globalisasi suatu negara berdasarkan tiga dimensi utama

1. Indeks Globalisasi Ekonomi

Mengukur tingkat integrasi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional, termasuk perdagangan internasional, investasi asing langsung, dan aliran modal.

2. Indeks Globalisasi Sosial

Menilai interaksi sosial lintas batas, seperti penyebaran informasi, pertukaran budaya, dan pergerakan manusia antar negara.

3. Indeks Globalisasi Politik

Mengevaluasi keterlibatan suatu negara dalam organisasi internasional, perjanjian multilateral, dan partisipasi dalam diplomasi global.

Tabel 2. 1 Indeks KOF Globalisasi menurut ETH Zurich

Indikator	Kontribusi (%)	Sub-Indikator	Kontribusi (%)	Variabel	Bobot
Globalisasi Ekonomi	36	Aliran Aktual	50	Rata-rata Perdagangan	22
				Investasi Langsung Asing	27
				Investasi Portofolio	24
				Pendapatan Pembayaran kepada Warga Negara Asing	27
				Kendala Impor yang Belum Ditemukan	24
		Hambatan	50		

				Tingkat Tarif	Varians	28
				Pajak Perdagangan Internasional		26
				Kendala Modal	Akun	23
Globalisasi Sosial	38	Kontak Pribadi	33	Tarif Telepon		25
				Transfer (% dari PDB)		3
				Pariwisata Internasional		26
				Populasi Negara Asing	Warga	21
				Surat Internasional Per kapita		25
		Informasi Arus	35	Penggunaan Internet (per 1000 orang)		36
				Televisi (per 1000 orang)		38
				Perdagangan Surat Kabar (% dari PDB)		26
		Ukuran Budaya	Kedekatan 32	Jumlah Restoran Outlet Mcdonald's (Per Kapita)		44
				Jumlah Outlet Ikea (Per Kapita)		44
				Perdagangan Buku (% dari PDB)		11
Globalisasi Politik	26	Jumlah <i>Ambassador</i>	25			
		Anggota Internasional	Organisasi 27			
		Partisipasi Dewan	Angkatan 22			
		Perjanjian Internasional	PBB 26			

Sumber: Halg (2020)

Indeks globalisasi disusun dari 23 variabel ekonomi, sosial, dan politik. Indeks globalisasi KOF ini memiliki skala 1 hingga 100, dimana semakin tinggi skalanya menunjukkan tingkat globalisasi yang semakin tinggi pula. Indeks globalisasi tersebut masing-masing memiliki bobot 36 persen untuk globalisasi ekonomi, 38 persen untuk indeks globalisasi sosial, dan 26 persen untuk indeks globalisasi politik, yang mana bobot dari ketiga sub-indeks tersebut dipergunakan untuk menghitung globalisasi secara keseluruhan.

Menurut Halg (2020) indeks ini dihitung dari mulai para peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti data perdagangan, investasi, dan aliran orang. Data ini kemudian diolah menjadi angka-angka yang mudah dibandingkan. Semua data yang dikumpulkan disamakan skalanya agar bisa dibandingkan. Misalnya, data perdagangan negara A dan negara B akan disamakan skalanya sehingga bisa dibandingkan secara langsung. Setiap faktor yang digunakan untuk menghitung indeks diberikan bobot atau nilai penting yang berbeda-beda. Bobot ini bisa berubah dari waktu ke waktu tergantung pada seberapa penting faktor tersebut dalam mengukur globalisasi pada tahun tertentu. Faktor-faktor yang mirip dikelompokkan menjadi sub-indeks, seperti sub-indeks perdagangan atau sub-indeks investasi. Sub-indeks-sub-indeks ini kemudian digabungkan menjadi satu indeks keseluruhan.

Dalam kerangka teori ketergantungan, globalisasi dipandang sebagai sistem yang mempertahankan ketimpangan struktural antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara berkembang sering kali hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah, sedangkan nilai tambah dan

keuntungan ekonomi justru terkonsentrasi di negara-negara maju. Akibatnya, globalisasi tidak serta-merta mengurangi kemiskinan, bahkan bisa memperburuknya karena negara berkembang tetap berada dalam posisi yang bergantung secara ekonomi dan teknologi. Di sisi lain, teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan bahwa setiap negara sebaiknya fokus pada produksi barang dan jasa yang bisa dihasilkan dengan efisiensi relatif lebih tinggi, lalu melakukan perdagangan internasional untuk saling melengkapi kebutuhan. Namun dalam praktiknya, teori ini bisa menimbulkan distorsi jika negara berkembang hanya diarahkan untuk mengekspor komoditas primer dengan harga rendah, sementara negara maju menguasai produksi teknologi dan barang bernilai tinggi. Ketidakseimbangan ini berisiko memperkuat dominasi ekonomi negara maju dan membatasi peluang negara berkembang untuk keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan (Mahfuzah dkk, 2024).

2.1.5 Efektivitas Pemerintah

Efektivitas pemerintah merupakan ukuran sejauh mana suatu pemerintahan mampu menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk dalam hal penyelenggaraan administrasi publik, implementasi kebijakan, serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kaufmann dkk (2011), efektivitas pemerintah diukur berdasarkan persepsi terhadap kualitas layanan publik, kualitas birokrasi, tingkat independensi dari tekanan politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan yang diambil. Semakin tinggi efektivitas pemerintah, semakin baik pula negara dalam mengelola sumber daya,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

Efektivitas pemerintah dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, antara lain:

1. Efektivitas dalam Pelayanan Publik

Mengacu pada kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat.

2. Efektivitas dalam Implementasi Kebijakan

Berkaitan dengan sejauh mana kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik serta memberikan hasil yang diharapkan.

3. Efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Mencakup transparansi anggaran, pengelolaan pajak, serta distribusi keuangan yang tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Efektivitas dalam Pemberantasan Korupsi

Melibatkan upaya pemerintah dalam memberantas praktik korupsi guna menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.

5. Efektivitas dalam Stabilitas Politik dan Hukum

Mengacu pada sejauh mana pemerintah mampu menjaga stabilitas politik dan menegakkan hukum secara adil dan konsisten.

Skor dalam rentang -2,5 hingga 2,5 dalam pengukuran efektivitas pemerintahan biasanya mencerminkan skala penilaian yang lebih luas, yang mencakup kondisi yang sangat buruk hingga sangat baik. Skala ini bisa digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dengan lebih rinci, memperlihatkan bagaimana hasilnya berhubungan dengan kinerja optimal (Laureti et al., 2023).

Penjelasan Rentang Skor -2,5 hingga 2,5:

1. Skor -2,5:

Menunjukkan kinerja pemerintahan yang sangat buruk. Dalam hal ini, pemerintah sangat tidak efektif dalam aspek yang dinilai. Indikator-indikator yang mengukur pelayanan publik, kapasitas birokrasi, penegakan hukum, atau kebijakan sosial akan menunjukkan kegagalan besar, misalnya ketidakmampuan dalam merespons kebutuhan masyarakat, korupsi yang merajalela, atau kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Kinerja pemerintah di bawah ambang batas standar minimal.

2. Skor 0:

Skor nol dapat menunjukkan kinerja yang tidak memadai atau rata-rata, dengan pemerintah yang mungkin hanya berhasil dalam beberapa aspek tertentu tetapi gagal dalam aspek lainnya. Meskipun ada upaya atau kebijakan yang dijalankan, efektivitasnya rendah dan dampaknya terbatas.

3. Skor 2,5:

Menunjukkan kinerja pemerintahan yang sangat baik. Pemerintah sangat efektif dalam mengelola kebijakan publik, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, serta stabilitas politik. Semua indikator penilaian menunjukkan hasil yang sangat positif, seperti respons yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan publik yang mudah diakses, dan keberhasilan dalam mengurangi korupsi serta membangun koordinasi yang baik antar lembaga.

Kriteria dalam Skala -2,5 hingga 2,5:

- a. -2,5 hingga -1: Pemerintahan sangat tidak efektif, banyak kegagalan dalam kebijakan dan pelayanan publik.
- b. -1 hingga 0: Pemerintahan mengalami beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan, dengan efektivitas yang masih rendah.
- c. 0 hingga 1: Pemerintahan cukup efektif, dengan beberapa kelemahan tetapi masih ada upaya positif dalam beberapa area.
- d. 1 hingga 2,5: Pemerintahan sangat efektif, menjalankan kebijakan dengan baik, merespons kebutuhan masyarakat, dan menjaga kestabilan sosial-politik.

Berikut adalah penjelasan mengenai teori-teori yang mendukung konsep efektivitas pemerintah, beserta tokoh yang mengemukakan dan sumbernya (Prasetyo, 2022):

1. Teori *Good Governance*

Teori ini menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum dalam pemerintahan yang efektif. UNDP (*United Nations Development Programme*) memperkenalkan konsep ini pada tahun 1997. Pemerintahan harus memenuhi standar tata kelola yang baik agar kebijakan dapat diterapkan secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Teori Birokrasi Weberian

Max Weber, seorang sosiolog dan ekonom politik asal Jerman, berpendapat bahwa birokrasi yang rasional, hirarkis, dan berdasarkan aturan yang jelas akan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Weber mengemukakan teori ini dalam karyanya yang diterbitkan pada tahun 1922. Struktur birokrasi yang efisien akan lebih efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

3. Teori Kapasitas Negara (*State Capacity Theory*)

Francis Fukuyama, seorang ilmuwan politik dan ekonom Amerika Serikat, menyatakan bahwa efektivitas pemerintah bergantung pada kapasitas negara dalam menegakkan hukum, mengelola ekonomi, serta menyediakan layanan dasar bagi warga negara. Teori ini dikemukakan oleh Fukuyama pada tahun 2013. Negara yang memiliki kapasitas tinggi dalam mengelola sumber daya dan kebijakan cenderung lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai **Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Globalisasi dan Efektivitas Pemerintah tahun 2000-2023**. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan penelitian ini.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Pneliti, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016-2020, (Salsabil & Rianti, 2023)	Pertumbuhan penduduk dan kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan kesehatan. Menggunakan metode data panel. Lokasi penelitian Jawa Barat	Pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan	Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Binsis (JRIEB), Vol.3, No.1
2	Pengaruh Globalisasi Ekonomi, IPM, dan Populasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Tujuh Negara Anggota OKI, (Firmani & Aif, 2021).	Globalisasi dan kemiskinan	IPM dan populasi. Lokasi di 7 Negara OKI. Metode data panel	Globalisasi ekonomi yang diproksikan dengan data keterbukaan perdagangan dan Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif signifikan,	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.24 No.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif signifikan	
3	Pengaruh Pendidikan, Tenaga Kerja dan Kesehatan terhadap Kemiskinan (Studi Kasus pada Provinsi Bali), (Aprilia & Sugiharti, 2022)	Tenaga kerja dan kemiskinan.	Pendidikan dan kesehatan. Metode ECM. Lokasi penelitian Provinsi Bali	Dalam jangka panjang, Tenaga Kerja yang memiliki pengaruh negatif signifikan. Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh negatif namun tidak signifikan	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Vol.5 No.2
4	Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019), (Sianturi et al., 2021)	Pertumbuhan penduduk dan kemiskinan	IPM, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Metode data panel.	Tingkat pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran berpengaruh secara simultan, Secara parsial, tingkat pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan,	Jurnal Samudra Ekonomi, Vol 5 No 2

					ketimpangan distribusi.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.	
5	Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Madiun, (Wardani & Arif, 2022)	Efektivitas pemerintah dan kemiskinan	Lokasi penelitian di Madiun	Secara parsial Program Indonesia Pintar dan Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh negatif namun signifikan, Dana Desa berpengaruh positif signifikan dan Program Keluarga Harapan berpengaruh negatif. Sedangkan pengaruh simultan Dana Desa, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Program Indonesia Pintar Signifikan	<i>Procedia of Social Sciences and Humanities</i>
6	The Role Of Population Growth, Education Level, Labor Force Participation Rate On Poverty Level In Indonesia,	Pertumbuhan penduduk, TPAK dan kemiskinan	Tingkat pendidikan	Pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan TPAK secara simultan berpengaruh. Pertumbuhan penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh	Journal of Law and Sustainable Development, Vol 12 No.2

	(Langoday & Man, 2024)			negatif dan signifikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Does Globalization Reduce Poverty At Each Level Of Development? Sensitivity To Poverty Lines, (Selim & Kaya, 2024)	Globalisasi dan Kemiskinan	Metode data panel, objek 176 negara	Globalisasi memiliki efek positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di negara-negara maju, sedangkan di negara-negara berkembang dan kurang berkembang, globalisasi tidak memiliki efek signifikan. Di negara-negara berkembang, tingkat pendidikan merupakan faktor pengurang yang efektif terhadap angka kemiskinan.	Journal Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences, Vol 46 No.1
8	Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan, Kabupaten/Kota Provinsi Bali (Trisnu & Sudiana, 2019)	Pertumbuhan penduduk dan kemiskinan	Pengangguran dan pendidikan. Objek penelitian Kabupaten/Kota Bali	Pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan. Pertumbuhan penduduk secara parsial berpengaruh positif signifikan	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol.8.No. 11
9	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap	Pertumbuhan penduduk, TPAK, dan kemiskinan	Tingkat pendidikan	Pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) berpengaruh secara simultan di Provinsi Papua. Pertumbuhan penduduk dan	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana

Kemiskinan di Provinsi		Tingkat partisipasi angkatan kerja			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Papua, (Alo & Sukadana, 2022)			(TPAK) berpengaruh negatif dan signifikan. Tingkat pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.	
10	The Effect Of Economic Growth, Human Development Index and Labor Force Participation Rate On Poverty In Aceh Province, (Yurina & Mislal, 2023)	Tingkat partisipasi angkatan kerja dan kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi dan IPM	Variabel indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif namun tidak signifikan, Adapun secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan	Journal Of Maliksussaleh Public Economics, Vol.6 No.1
11	<i>Quality of Government and Subjective Poverty in Europe</i> , (Baldini et al., 2018)	Efektivitas pemerintah dan kemiskinan	Objek Negara Eropa	Tata kelola yang baik secara signifikan mengurangi kemungkinan menjadi miskin secara subjektif, baik di seluruh populasi maupun di antara rumah tangga yang miskin dalam hal pendapatan moneter.	CESifo Economic Studies, Vol 64 No.3

12	<i>Institutions and Poverty,</i>	Lembaga pemerintah	Metode analisis	Ukuran alternatif lembaga berhubungan	Journal of Development
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Tebaldi & Mohan, 2010)	dan kemsikinan	variabel instrumental	negatif dengan tingkat kemiskinan. berkembang. Hasilnya memberikan bukti bahwa beberapa lembaga lebih kondusif dalam memengaruhi kemiskinan daripada yang lain dan bahwa lembaga memengaruhi kemiskinan melalui saluran yang berbeda.	Studies, Vol 46 No. 6
13	Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia, (Wulandari et al., 2022)	Pemerintah dan kemiskinan	Metode kualitatif	Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan meliputi 5 hal antara lain, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, eningkatkan akses masyarakat	Jurnal Inovasi Penelitian , Vol 2 No.10

					miskin kepada pelayanan dasar serta membangun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.		
14	Globalization Reducing Absolute Poverty?, (Bergh & Nilsson, 2014)	Globalisasi dan kemiskinan	Objek negara	114	Korelasi negatif yang signifikan antara globalisasi	World Development, Vol 62
15	Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, (Muttaqin & Anwar, 2023)	Tingkat partisipasi angkatan kerja dan kemiskinan	Inflasi dan pengangguran terbuka. Metode <i>Autoregressive Distributed Lag</i> (ARDL)		Jangka pendek tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan, TPAK berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh positif dan signifikan. Dalam jangka panjang, inflasi berpengaruh negatif, tingkat lapangan kerja terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan TPAK juga berpengaruh negatif namun signifikan	Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi, Vol.2 No.2

2.2 Kerangka Pemikiran

1. Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Kemiskinan

Pertumbuhan penduduk dan kemiskinan memiliki hubungan yang kompleks yang telah lama menjadi fokus penelitian sosial-ekonomi. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu negara. Ketika pertumbuhan penduduk meningkat, kebutuhan akan sumber daya, lapangan kerja, dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga meningkat. Beberapa penelitian mendukung pandangan ini, seperti studi oleh Rahman & Khanam (2021) yang menemukan hubungan positif antara pertumbuhan penduduk dan kemiskinan di negara-negara berkembang. Hulantu & Canon (2022) menganalisis pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian Sianturi dkk (2021) dan (Salsabil & Rianti, 2023) juga terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pertumbuhan.

Meskipun banyak bukti menunjukkan hubungan positif antara pertumbuhan penduduk dan kemiskinan, pengaruh ini sebenarnya lebih kompleks. Pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan kemiskinan ketika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan investasi di bidang pendidikan serta kesehatan. Namun, penduduk yang lebih besar juga berpotensi menyediakan tenaga kerja produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, terutama jika didukung oleh kebijakan yang tepat. Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan penduduk dan kemiskinan sangat bergantung pada konteks institusional, infrastruktur sosial, dan kebijakan ekonomi suatu negara. Faktor-faktor seperti distribusi umur populasi, tingkat pendidikan,

dan struktur ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan apakah pertumbuhan penduduk akan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan atau sebaliknya.

2. Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan Kemiskinan

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan indikator penting yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Hubungan TPAK dengan kemiskinan telah banyak dibahas dalam literatur ekonomi pembangunan. Secara umum, TPAK yang tinggi berpotensi mengurangi kemiskinan jika diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai. Penelitian oleh Fauziah dkk (2021) menemukan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Faridi dkk (2016) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan sumber utama pengentasan kemiskinan yang berkontribusi secara signifikan. Sihite dkk (2024) dan Aprilia & Sugiharti (2022) bahwasanya tingkat partisipasi angkatan kerja mempunyai dampak negatif dan signifikan atas terhadap kemiskinan. Hal ini mendeskripsikan kenaikan partisipasi angkatan kerja bisa membawa dampak positif bagi perekonomian, karena lebih banyak orang mempunyai akses atas pekerjaan dan penghasilan. Ini bisa meminimalisir tingkat kemiskinan dengan memberi lebih banyak kesempatan kepada masyarakat guna menuntaskan keperluan dasar.

Analisis terhadap hubungan TPAK dengan kemiskinan perlu mempertimbangkan tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas partisipasi tenaga kerja. TPAK yang tinggi tidak selalu menjamin pengurangan kemiskinan jika jenis

pekerjaan yang tersedia adalah pekerjaan dengan produktivitas rendah, upah rendah, atau kondisi kerja yang buruk. Fenomena "bekerja tetapi miskin" (*working poor*) menunjukkan bahwa partisipasi dalam angkatan kerja tidak secara otomatis mengangkat seseorang dari kemiskinan. Selain itu, akses terhadap pekerjaan formal dan jaminan sosial juga memainkan peran penting dalam menentukan dampak TPAK terhadap kemiskinan (Lee dan Wie, 2020). Faktor-faktor seperti diskriminasi gender, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta segmentasi pasar tenaga kerja juga mempengaruhi sejauh mana peningkatan TPAK dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

3. Hubungan Indeks Globalisasi dengan Kemiskinan

Salah satu cara untuk mengukur seberapa terlibat sebuah negara dalam proses globalisasi adalah dengan menggunakan indeks globalisasi, yang mendefinisikan globalisasi sebagai proses yang luas di mana negara-negara bersatu dalam hal ekonomi, politik, dan sosial. Ada beberapa studi telah mencoba mengukur hubungan antara globalisasi dan pengangguran. Hasilnya sering berbeda tergantung pada negara, periode waktu, dan indikator yang digunakan. Penelitian oleh Chen dan Agusalim & Pohan (2017) menggunakan Indeks Globalisasi KOF menemukan bahwa globalisasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, tetapi dalam jangka panjang dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun diperkuat oleh penelitian Osinubi & Olomola (2021) menganalisis semakin tinggi tingkat globalisasi suatu negara yang mencakup integrasi ekonomi, sosial, dan politik dengan dunia internasional maka semakin rendah tingkat

kemiskinan di negara tersebut. Artinya jika globalisasi membuka akses ke pasar global, mendorong investasi asing, dan mempercepat transfer teknologi, sehingga menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya keterbukaan ekonomi, negara berkembang dapat mengalami pertumbuhan yang lebih inklusif, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian Syahraniyah (2016) dan Citra (2022) juga menunjukkan bahwa globalisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat globalisasi suatu negara, semakin rendah tingkat kemiskinannya.

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa globalisasi, jika dikelola dengan tepat, dapat menjadi alat strategis untuk mengurangi kemiskinan di negara berkembang. Negara-negara yang mampu merancang kebijakan inklusif, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan kualitas modal manusia cenderung memperoleh manfaat lebih besar dari globalisasi. Kemudian globalisasi bukan hanya sekadar fenomena keterbukaan ekonomi semata, tetapi juga merupakan mekanisme nyata yang mampu mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan (Purba et al., 2023).

4. Hubungan Efektivitas Pemerintah dengan Kemiskinan

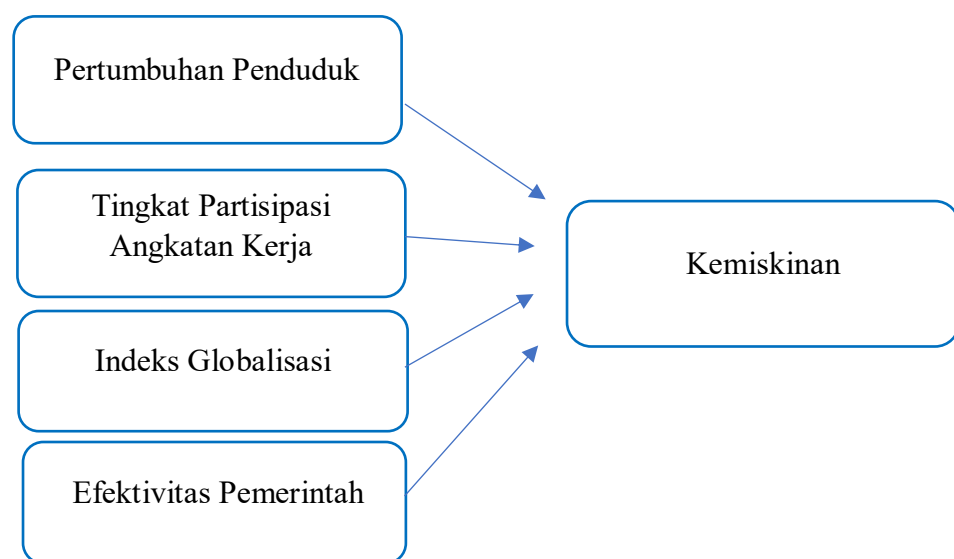
Efektivitas pemerintah, yang mencakup kualitas layanan publik, birokrasi, formulasi dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah, memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah yang efektif dapat menyediakan layanan dasar, infrastruktur, dan program perlindungan

sosial yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan. Penelitian oleh Wardani & Arif, (2022) menemukan korelasi negatif yang kuat antara indikator efektivitas pemerintah dan tingkat kemiskinan yang dimana kebijakan pemerintah dapat mengurangi kemiskinan. Studi longitudinal oleh (Abubakar, 2023) menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pemerintah berhubungan dengan penurunan kemiskinan yang signifikan di negara Nigeria. (Priambodo & Djirimu, 2024) menyatakan peningkatan efektivitas pemerintah berhubungan dengan penurunan kemiskinan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik dan implementasi yang efektif dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Sementara itu, Ramadhan & Riani (2024) bahwa tata kelola pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN.

Efektivitas pemerintah mempengaruhi kemiskinan melalui beberapa mekanisme. Pertama, pemerintah yang efektif dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan anti-kemiskinan yang lebih tepat sasaran, seperti program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pemerintah yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Ketiga, pemerintah yang efektif dapat mengelola sumber daya publik dengan lebih efisien dan mengurangi kebocoran anggaran akibat korupsi, sehingga lebih banyak sumber daya yang dapat dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan. Selain itu, efektivitas pemerintah juga berkaitan dengan kemampuan untuk merespons krisis dan guncangan yang dapat menyebabkan kemiskinan, seperti pandemi, bencana alam, dan krisis ekonomi.

Dengan demikian, memperkuat institusi publik dan meningkatkan kapasitas pemerintah merupakan aspek penting dalam strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial pertumbuhan penduduk berpengaruh positif, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks globalisasi, dan efektivitas pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia 2000-2023.

2. Diduga secara bersama-sama pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks globalisasi, dan efektivitas pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia 2000-2023.